

# DINAMIKA TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

**Jayusman**

Pusat Riset Konservasi Tanaman, Kebun Raya dan Kehutanan (PRKTKRK)  
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  
e-mail: jayusmansoemodihardjo@gmail.com

## Abstrak

Dinamika perubahan yang terjadi dalam birokrasi pemerintah daerah tidak pernah terlepas dari regulasi oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) ke Pemerintah Pusat sangat banyak memberikan tantangan baru dalam operasional organisasi termasuk pengaturan ulang sistem manajemen yang diterapkan. Proses implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) berbasis Sistem Manajemen Mutu atau SMM (ISO 9001:2015) dan Sistem Manajemen Keamanan informasi atau SMKI (ISO 27001:2013) tentunya harus menyesuaikan regulasi tersebut dalam operasionalnya. Keberadaan klausul 6.3 Sistem Manajemen Mutu (SMKI) yang menyebutkan bahwa perubahan itu harus direncanakan dan persyaratan klausul 10.3 tentang perbaikan berkelanjutan perlu kaji ulang untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Klausul tentang perbaikan berkelanjutan sebagaimana konsep PDCA (*plan, Do, Check, Action*) yang senantiasa bergulir menuju tahap peningkatan terus menerus. Peta kesesuaian klausul dan sub klausul dari kedua sistem yang diintegrasikan dapat difokuskan pada klausul 6 (perencanaan) dan klausul 8 (operasional). Sub klausul 6.3 dipersyaratkan pada SMM tetapi SMKI tidak mensyaratkan. Selain itu pada SMM mensyaratkan sub klausul dari 8.1 – 8.7 sedangkan SMKI hanya mensyaratkan sub klausul 8.1, 8.2 dan 8.3. Hasil pemetaan persyaratan standard telah dituangkan dalam matriks kesesuaian, diikuti penyusunan struktur Informasi terdokumentasi SMT, penetapan struktur pengelola SMT, identifikasi hambatan penerapan SMT dan harmonisasi operasional SMT. Pembuatan matrik integrasi kegiatan dalam SMT harus disepakati oleh seluruh pengelola SMT dan dievaluasi secara periodik untuk memastikan seluruh target yang ditetapkan terpenuhi.

**Kata Kunci:** Perbaikan berkelanjutan, PDCA, SMM, SMKI dan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT).

## 1. PENDAHULUAN

PAS 99 (*Publicly Available Specification 99*) yang dikeluarkan dari *British Standard Institution* (BSI, 2012; Mustika *et al.*, 2016) merupakan persyaratan umum untuk sistem manajemen yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam merancang suatu sistem manajemen terintegrasi (SMT) atau *Integrated Management System* (IMS). Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mendorong institusi/organisasi/perusahaan yang menggunakan lebih dari satu sistem manajemen dengan memandang PAS 99 sebagai peluang untuk memiliki sistem manajemen tunggal holistik yang memungkinkan mereka menjalankan operasi secara lebih efektif. Landasan penerapan utama SMT adalah pada saat ini sudah tidak relevan lagi menerapkan sistem tunggal atau secara terpisah.

Implementasi SMM (ISO 9001:20015) merupakan versi terbaru (BSN, 2015) difokuskan dalam manajemen kualitas atau mutu sedangkan SMKI (ISO 27001) memiliki pendekatan sistematis dan proaktif untuk mengelola risiko keamanan informasi organisasi atau perusahaan secara efektif. Sistem ini merupakan acuan dalam mengelola dan melindungi informasi sensitif perusahaan secara efisien yang mencakup personil, proses dan sistem informasi teknologi (BSN, 2013). Peluang mengintegrasikan kedua sistem manajemen tersebut sangat besar karena memiliki banyak persyaratan standard yang potensial dapat diintegrasikan. Kajian terhadap proses penerapan SMT telah banyak dilaporkan antara lain terkait dengan ragam perspektif (Domigues *et al.*, 20015), design SMT (Wang & Tsai, 2009; Suprayitno *et al.*, 2020; Rosiawan, 2021;), SMT terkait efisiensi penanganan peralatan (Zaloga *et al.*, 2009) dan SMT terkait proses Audit SMT berbasis ISO 9001 + ISO 27001 dalam Total Quality Management & Business Excellent (Hoy & Foley (2015). Penerapan SMT berbasis SMM (ISO 9001:2015) dengan SMKI (ISO 27001) diantaranya telah diterapkan di PT.Teradata

Megah sejak tahun 2018 (Teradata, 2020). Penerapan SMT berbasis 9001+27001+Standar LPSE pada Data Center dan e-Procurement di Pemerintahan DI Yogyakarta dengan pertimbangan ketiga standard tersebut memiliki banyak kesamaan prosedur operasional, beririsan, dan dapat dikerjakan secara bersamaan. Apabila prosedur tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri maka berdampak pada lamanya waktu pengerjaan dan fokus pekerjaan yang banyak bercabang sehingga pekerjaan tidak terlaksana secara efisien. Tujuan SMT adalah tercapainya efisiensi operasional (Harumi *et al.*, 2021).

Umumnya manfaat penerapan SMT terkait dengan beberapa aspek antara lain (1) mengurangi duplikasi pekerjaan, (2) mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, (3) menselaraskan sasaran, (4) menselaraskan tanggung jawab dan wewenang, (5) lebih fokus dalam menyelesaikan masalah, (6) menciptakan konsistensi, (7) meningkatkan efektifitas komunitas, (8) meningkatkan kinerja perusahaan serta (9) mampu menekan jumlah ketidaksesuaian audit pihak ke 3 dan (10) pengendalian informasi terdokumentasi terbukti menjadi lebih efektif dan efisien.

Integrasi SMM ISO 9001:2015 + SMKI ISO 27001 di beberapa organisasi hingga saat ini masih sangat relevan untuk dilakukan hal ini sudah menjadi tuntutan terutama bagi organisasi yang memberikan jasa pelayanan termasuk produk. Tujuan penelitian adalah untuk memetakan proses implementasi SMT dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi kearah sentralistik atau terpusat. Pembelajaran terkait strategi organisasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang sifatnya tidak dapat direncanakan karena berasal dari regulasi pemerintahan pusat cukup penting untuk dipahami dalam rangka membangun SMT yang kuat untuk mendukung mutu proses operasional dan keamanan informasinya.

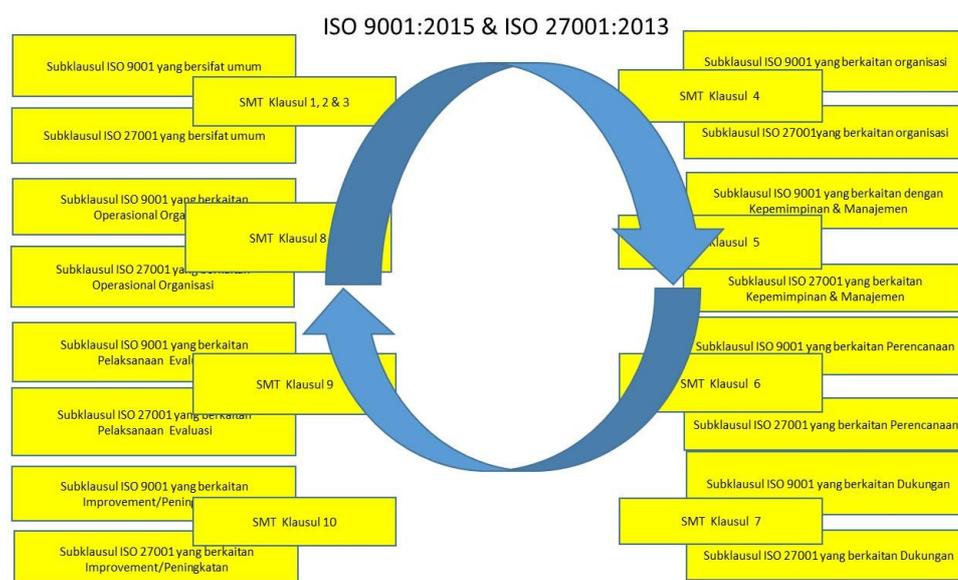
## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Evaluasi pengamatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Maret – Mei tahun 2022.

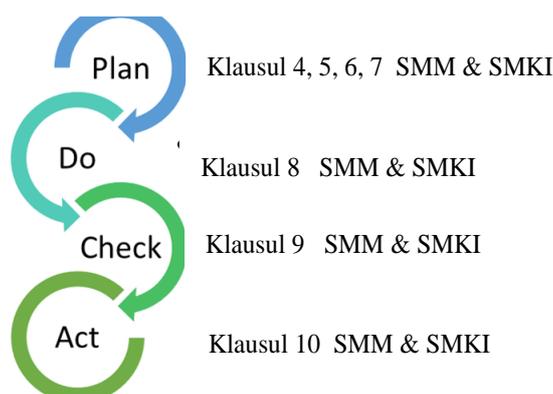
### 2.2. Prosedur Kegiatan

a. Pengamatan ini merupakan *desk research* dengan tujuan untuk mengevaluasi progres integrasi persyaratan standar ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013. Secara ringkas tahapan integrasi ke dua sistem manajemen tersebut diatas tertera dalam bagan alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir proses integrasi SMM dan SMK

- b. Proses awal dilakukan melalui pemetaan pada bagian pengenalan sistem manajemen yang mencakup bagian 0.1, 0.2, 0.3 dan 0.4 dan dilanjutkan pemetaan pada klausul pengantar (Klausul 1, 2 dan 3). Tahap ini merupakan integrasi awal sesuai isi klausul pengantar untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standard Sistem Manajemen Mutu atau SMM (ISO 9001:2015) & Sistem Manajemen atau SMKI (ISO 27001:2013).
- c. Proses pemetaan selanjutnya adalah menyusun konsep sistem manajemen terintegrasi berdasarkan siklus PDCA (*Plan/perencanaan, Do/operasional, Check/evaluasi kinerja, Action/peningkatan*). Keterkaitan Klausul dan proses PDCA tertera pada gambar 2.



**Gambar 2.** Bagan alir proses integrasi berdasarkan konsep PDCA & Klausul Terkait

- 1) Pada tahap perencanaan ini mencakup lintas klausul 4, 5, 6 dan 7 dengan menghubungkannya agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan kedua standar sekaligus. Pencermatan dan pemetaan ke 4 (empat) klausul tersebut ditujukan untuk menetapkan perencanaan SMT (ISO 9001 & ISO 27001). Terdapat beberapa persyaratan klausul pada kedua system yang kategorinya relevan tetapi terdapat sub-sub klausul yang tidak relevan sehingga membutuhkan beberapa penjelasan dan penambahan narasi penghubung.
- 2) Proses pemetaan berikutnya adalah tahap operasional yang identik dengan klausul 8 pada standard SMM dan SMKI. Kegiatan integrasi standard pada klausul 8 (delapan) dengan melakukan penggabungan lintas standard dengan penambahan kalimat penghubung sesuai keperluannya serta pembuatan standard mandiri tetapi tetap memenuhi persyaratan-persyaratan ISO 9001 & ISO 27001.
- 3) Proses pemetaan berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja yang identik dengan klausul 9 pada SMM & SMKI. Pada tahap ini semua sub klausul memiliki kesesuaian yang memudahkan integrasi untuk persyaratan SMT.
- 4) Proses pemetaan berikutnya pada tahap peningkatan sesuai klausul 10 dari SMM dan SMKI. Pada tahap ini terdapat juga sub-sub klausul yang memiliki kesesuaian yang memudahkan proses integrasi untuk persyaratan SMT.

### 2.3. Analisa Data

Seluruh data primer hasil pengamatan ditabulasi dan dikaji ulang kedalam matriks pemetaan (Lampiran 1). Berdasarkan matrik pemetaan kesesuaian standard tersebut dilakukan integrasi standard SMM & SMKI kedalam struktur SMT, penetapan struktur informasi terdokumentasi SMT untuk pemandu proses dan panduan penyiapan bukti operasional SMT, penetapan struktur pengelola SMT, penetapan potensi hambatan penerapan SMT dan harmonisasi operasional SMT.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (DISDUKCAPIL) menjadi sentralistik menjadikan pelayanan DISDUKCAPIL Tingkat Kabupaten harus diselaraskan. Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang dilakukan secara partial tidak terlepas dari proses penyelarasan menjadi Sistem Manajemen Terintegrasi atau SMT (SMM + SMKI) dengan panduan umum Standard PAS 99 dan beberapa acuan dalam merancang SMT. Pemetaan tahapan penyusunan SMT berdasarkan standard SMM dan SMKI di DISDUKCAPIL Kabupaten Bantul diuraikan dalam beberapa aspek yang mencakup:

#### 3.1. Pemetaan Standard Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT)

Hasil pemetaan standard SMT berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan bagan alir pada Gambar 1 dan Gambar 2 hasilnya tertuang dalam **Lampiran 1**. Induk SMT adalah SMM dan persyaratan standard SMKI menjadi bagian yang diintegrasikan. Berdasarkan pemetaan dalam Lampiran 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam Klausul SMM tidak dipersyaratkan dalam SMKI, sehingga penempatan beberapa sub klausul SMKI tidak selalu selaras sama persis dengan persyaratan dalam sub klausul SMM dan kondisi tersebut sudah pertimbangan dalam pemetaan akhir dalam penentuan struktur persyaratan SMT.

Matriks pemetaan (Lampiran 1) berfungsi menjamin seluruh persyaratan standard dari setiap sistem yang diintegrasikan telah terpenuhi. Matriks pemetaan mampu menggambarkan pengurangan kegiatan atau aktifitas rutin yang ditetapkan dalam standard tunggal sehingga operasional SMT lebih optimal. Matriks pemetaan dapat menjadi buku pintar bagi pengelola SMT, serta mampu mengeliminir gap akibat dikotomi bukti operasional untuk SMT serta untuk operasional organisasi yang pada awalnya masih terpisah. Integrasi operasional SMT dalam institusi harus dipastikan efektifitasnya. Penyelarasan setiap persyaratan standard dalam operasional SMT secara berkesinambungan harus dievaluasi pengelola SMT.

#### 3.2. Struktur informasi terdokumentasi

Pengelompokan level informasi terdokumentasi dalam SMT DISDUKCAPIL Kabupaten Bantul ditetapkan menjadi 2 (dua) level yaitu level I dengan istilah Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (PSMT) dan Level II dengan istilah Prosedur Kerja Manajemen Terintegrasi (PKMT) yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja Manajemen Terintegrasi (FKMT) dan beberapa SOP (standard operasional prosedur) terkait serta Formulir Kerja Manajemen Terintegrasi (FKMT). Pada awal penyusunan SMT struktur informasi terdokumentasi masih mengakomodir keberadaan dokumen yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sistem tunggal seperti SOP dan RO (*Risk & Opportunity*), kebijakan-kebijakan organisasi yang masih menggunakan kodifikasi model sistem tunggal. Kondisi tersebut ditujukan untuk kemudahan awal implementasi SMT tetapi secara bertahap perubahan istilah dan kodifikasi sistem tunggal akan bermigrasi secara total dalam model kodifikasi tunggal dalam SMT.

Integrasi informasi terdokumentasi secara spesifik diterapkan dalam penyusunan standard (1) Kebijakan SMT, (2) Kebijakan Organisasi, (3) Struktur organisasi dan uraian tugas pengelola SMT, (4) penetapan audit internal dan eksternal SMT, (5) identifikasi harapan pihak-pihak terkait, (6) Program dan Sasaran SMT, (7) Audit SMT, (8) Tinjauan SMT, (9) Acuan Informasi terdokumentasi SMT dan (10) Surat keputusan Tim Auditor Internal dan Tim pengelola pendukung operasional SMT yang mencakup Tim Manajemen Risiko, Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Tim Penanganan Komplain dan Tim Keamanan Informasi Teknologi.

### 3.3. Struktur Pengelola SMT

Struktur organisasi pengelola SMT ditetapkan dengan mempertimbangkan numenclatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Bantul, dimana Kepala Dinas ditetapkan sebagai Manajer Puncak (MP) dan sekretaris Dinas sebagai Sekretaris Mutu (SM). Penyatuan personil sekretaris yang sebelumnya terbagi dalam sistem tunggal yang diterapkan sebelumnya telah disatukan dalam Tim Sekretaris Mutu. Keberadaan Tim adhoc seperti Tim Survei, Tim Manajemen Risiko, Tim penanganan komplain dan Tim Informasi Teknologi (IT) masih relevan dan layak dipertahankan dalam struktur pengelola SMT.

### 3.4. Dinamika Tantangan dalam SMT

Keberadaan dinamika perubahan menjadi hal yang sangat tidak dihindari seperti regulasi yang digulirkan pemerintah terkait pengalihan sentra pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang awalnya berada dalam setiap organisasi di Kabupaten dialihkan menjadi sentralistik pada pemerintah pusat. Regulasi tersebut tentunya memiliki implikasi dalam operasional pelayanan DISDUKCAPIL. Penyesuaian kinerja layanan dengan sistem sentralistik otomatis melewati sekat birokratis yang sebelumnya mulai dari tingkat kabupaten – tingkat provinsi – tingkat Pusat Pemerintahan, telah bergeser menjadi kontrol pemerintah pusat. Upaya melakukan optimalisasi pelayanan dalam situasi dan dinamika perubahan yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri diantisipasi melalui berbagai pendekatan dan salah satunya melakukan integrasi beberapa sistem manajemen yang selama ini sudah diterapkan.

Perubahan tersebut berimplikasi juga terhadap pengaturan kebijakan organisasi yang tertuang dalam operasional SMT, sehingga pedoman SMT dan banyak prosedur operasional pelayanan harus disesuaikan. Perubahan yang bersifat dari pusat (*top down*) memang sulit diantisipasi meskipun dalam pedoman SMT pada bab 6.3 telah mengatur bahwa setiap perubahan harus direncanakan. Terjadinya perubahan yang sentralistik tentunya sangat sulit direncanakan dalam SMT, tetapi strategi penyesuaian terhadap perubahan tersebut harus secepatnya ditetapkan dan dicarikan solusi terbaiknya. Implementasi SMT menjadi salah satu pilihan yang sifat sangat strategis dan diharapkan memberikan jaminan mutu proses dan jaminan keamanan informasi organisasi.

### 3.5. Hambatan Implementasi SMT

Sistem Manajemen Terintegrasi yang pada awalnya dibangun dari beberapa sistem tunggal tentunya masih menyisakan potensi operasional sistem tunggal, dimana kondisi ini tidak sepenuhnya bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Hambatan komunikasi dan inkonsistensi penerapan SMT masih terlihat pada periode awal penerapan SMT. Dalam banyak kasus beberapa faktor penghambat dalam penerapan SMT antara lain mencakup (1) penerapan SMT yang tidak tepat, (2) masih adanya dikotomi sistem manajemen tunggal, (4) struktur organisasi pengelola dan tugas, pokok dan fungsi yang tidak berjalan, (5) terbatasnya dukungan sumberdaya, (6) kurangnya konsistensi, (7) kurangnya kepedulian dan (8) kurangnya pemahaman. Pemetaan faktor penghambat tersebut secara periodik perlu dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam penerapan SMT.

### 3.6. Harmonisasi SMT

Upaya harmonisasi Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) berdasarkan pengalaman menghasilkan beberapa pendekatan, diantaranya (1) dilakukan secara bertahap atau satu persatu dan (2) penerapan SMT pada lingkup tertentu yang secara bertahap ditingkatkan, untuk setiap unit-unit bisnis dan divisi yang relevan, sehingga perlu ditetapkan *milestone*-nya. Proses implementasi SMT memerlukan sumber daya, biaya, waktu dan konsekuensi operasional yang selalu menarik untuk dievaluasi dan ditingkatkan dari masa ke masa. Kondisi tersebut sesuai

standard persyaratan dalam klausul 10.3 SMT, dimana organisasi diminta untuk selalu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Penetapan Prosedur Kerja terkait improvement/peningkatan menjadi sangat penting untuk ditetapkan, dibuat untuk panduan operasionalnya. Harmonisasi operasional SMT minimal dapat dimulai melalui kegiatan terintegrasi sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Kegiatan Terintegrasi dalam SMT (9001+27001)

Urain Kegiatan	SMM ISO 9001:2015	SMKI ISO 27001:2013
Pemahaman Persyaratan Sistem	✓	✓
Monitoring Risiko	✓	✓
Mekanisme penanganan ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	✓	✓
Audit Internal	✓	✓
Audit Eksternal	✓	✓
Tinjauan Manajemen	✓	✓
Peningkatan/Improvement	✓	✓
Identifikasi risiko	-	-

Note: Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan persyaratan setiap standard secara terpisah tetapi dalam monitoring risiko operasionalnya dapat dilakukan secara terintegrasi

## 4. SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

### 4.1. Simpulan

Pemetaan standard SMM dan SMKI kedalam Sistem Manajemen Terintegrasi menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan kedua standard tersebut mampu diintegrasikan dengan induk SMT adalah SMM (ISO 9001) dan SMK (ISO 27001) menjadi bagian yang diintegrasikan. Struktur informasi terdokumentasi dipetakan kedalam dua strata yaitu Pedoman SMT (PSMT) untuk panduan penerapan serta Prosedur Kerja Manajemen Terintegrasi (PKMT) untuk operasionalnya. Potensi hambatan pada awal penerapan SMT yang telah dipetakan akan dievaluasi secara periodik untuk dasar peningkatan SMT secara berkelanjutan.

### 4.2. Saran

Evaluasi penerapan SMT untuk mengetahui tingkat efektifitas penerapan minimal dilakukan dalam satu periode sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

### 4.3. Rekomendasi

Kegiatan terintegrasi dapat ditempuh mencakup (1) peningkatan pemahaman dan interpretasi persyaratan SMM dan SMKI melalui training awareness, (2) monitoring Risiko, (3) penanganan ketidaksesuaian dan Tindakan perbaikan, (4) kegiatan audit internal dan eksternal, (5) Tinjauan SMT dan (6) Kegiatan Improvement SMT yang berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- BSN, 2015. ISO 9001:2015. Quality management systems-Requirement.
- BSN, 2013. ISO 27001:2013. Information security management systems-Requirement.
- BSI, 2012. PAS 99 Integrated Management. Product Guide. Specification of Common Management System requirements as a Framework for Integration. British Standards Institution. BSI Standard Limited.
- Domingues, J. P. T., Sampaio, P., & Arezes, P. M. 2015. Analysis of integrated management systems from various perspectives. *Total Quality Management & Business Excellence*, 26(11-12), 1311-1334.
- Harumi, F., Nugroho, L. E., & Kusumawardani, S.S. 2021. Efisiensi ISO 27001, ISO 9001, dan Standar LPSE pada Data Center dan e-Procurement Pemerintahan. *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 6(1), 50-58.

- Hoy, Z., & Foley, A. 2015. A structured approach to integrating audits to create organisational efficiencies: ISO 9001 and ISO 27001 audits. *Total Quality Management & Business Excellence*, 26(5-6), 690-702.
- Mustika, P., Nuraida, L., & Kusumaningrum, H. D. 2016. Penerapan Audit Internal Terpadu dalam Sistem Manajemen Terpadu Berdasarkan PAS 99: 2012 Di Industri Perisa. *Jurnal Mutu Pangan (Indonesian Journal of Food Quality)*, 3(2), 111-117.
- Suprayitno, G., & Stendel, A. P. (2020). Integration management system design. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(13), 35-56.
- Rosiawan, M. 2021. *Integrated Management System*. ISBN:978-623-6373-81-1. Penerbit (Anggota IKAPI & APPTI)Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya. 137 halaman
- PT. Teradata. 2020. Penerapan Standard ISO 9001 dan ISO 27001. <https://www.teradata.co.id/2020/11/05/penerapan-standard-iso-9001-dan-iso-27001-di-pt-teradata-megah/>
- Wang, C.H., & Tsai, D.R. 2009. Integrated installing ISO 9000 and ISO 27000 management systems on an organization. In 43<sup>rd</sup> Annual 2009 international arnahan conference on security technology (pp. 265-267).
- Zaloga, V., Dyadyura, K., Rybalka, I., & Pandova, I. 2019. Implementation of integrated management system in order to enhance equipment efficiency. *Management Systems in Production Engineering*.

**Lampiran 1.** Matriks Kesesuaian Persyaratan Standard SMT (SMM ISO 9001:2015 + SMKI ISO 27001:2013)

No Klausul	Persyaratan SMM (ISO 9001:2015)	No Klausul	Persyaratan SMKI (ISO 27001:2013)	Penjelasan & Struktur Infodok Sistem Manajemen Terintegrasi
0.0	Pengantar SMM	0.0	Pengantar SMKI	
0.1	Umum	0.1	Umum	SMM Fokus Mutu & SMKI Fokus Keamanan Informasi
0.2	Prinsip Manajemen Mutu	-	-	-
0.3	Pendekatan Proses	-	-	-
0.4	Hubungan dengan Standard Manajemen lain	0.2	Hubungan dengan Standard Manajemen lain	Kedua standar diselaraskan dengan Annex SL dan menerapkan level tinggi struktur, memudahkan penggabungan menjadi satu, terintegrasi sistem manajemen.
1.0	Ruang Lingkup	1.0	Ruang Lingkup	Tertuang dalam Pedoman SMT
2.0	Acuan Normatif	2.0	Acuan Normatif	Tertuang dalam Pedoman SMT
3.0	Terminologi & Definisi	3.0	Terminologi & Definisi	Tertuang dalam Pedoman SMT
4.0	Konteks Organisasi	4.0	Konteks Organisasi	
4.1	Memahami Organisasi dan Konteksnya	4.1	Memahami Organisasi dan Konteksnya	Determinasi isu internal & External (Tertuang dalam Pedoman SMT)
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan	4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan	Identifikasi kebutuhan & Harapan (Tertuang dalam Pedoman SMT)
4.3	Menetapkan scope SMM	4.3	Menetapkan scope SMKI	Penetapan scope SMT (Tertuang dalam Pedoman SMT)
4.4	SMM dan Proses-Prosesnya	4.4	SMKI dan Proses-Prosesnya	setiap sistem harus ditetapkan, diimplementasikan, didokumentasikan, dan terus ditingkatkan (Tertuang dalam Pedoman SMT)
5.0	KEPEMIMPINAN	5.0	KEPEMIMPINAN	
5.1	Kepemimpinan dan komitmen	5.1	Kepemimpinan dan komitmen	Manajemen harus memperlakukan SMT dengan cara yang sama terkait penerapan kebijakan, penyediaan sumber daya, perbaikan terus-menerus, menetapkan peran dan tanggung jawab (Tertuang dalam Pedoman SMT)
	5.1.1 Umum			
	5.1.2 Customer Focus			
5.2	Kebijakan Mutu	5.2	Kebijakan Mutu	Penambahan kebijakan operasional organisasi (tertuang di Pedoman SMT)
	5.2.1 Membangun kebijakan Mutu			
	5.2.2 Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu			
5.3	Peran tanggung Jawab dan Wewenang dalam Organisasi	5.3	Peran tanggung Jawab dan Wewenang dalam Organisasi	Penetapan Peran tanggung Jawab dan Wewenang dalam Organisasi dalam Pedoman SMT
6.0	PERENCANAAN SMM	6.0	PERENCANAAN SMM	
6.1	Tindakan untuk mengendalikan resiko dan peluang	6.1	Tindakan untuk mengendalikan resiko dan peluang	Penjelasan di Pedoman SMT dan di Prosedur Kerja Manajemen Risiko & Peluang
6.2	Sasaran Mutu dan Perencanaan untuk mencapainya	6.2	Sasaran Mutu SMKI dan Perencanaan untuk mencapainya	Penetapan Sasaran SMT (Tertuang di Pedoman SMT)
6.3	Perencanaan perubahan-perubahan	6.3	-	Perencanaan Perubahan SMT (Tertuang di Pedoman SMT)
7.0	Dukungan	7.0	Dukungan	
7.1	Sumberdaya	7.1	Sumberdaya Umum	Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk eksekusi proses untuk memenuhi persyaratan SMT
	7.1.1 Umum	7.1.1		

				(Tertuang di Pedoman SMT)
	7.1.2 People/Orang	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
	7.1.3 Infrastruktur	-	-	Pengaturan di Pedoman SM
	7.1.4 Lingkungan proses/Kerja	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
	7.1.5 Pemantauan/pengukuran	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
	7.1.6 Pengetahuan organisasi	-	-	Pengaturan di Pedoman SM
7.2	Kompetensi	7.2	Kompetensi	Penjelasan di Pedoman SMT dan di Prosedur Kerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
7.3	Kepeduliaan	7.3	Kepeduliaan	SDM harus menyadari hal yang relevan kebijakan dan prosedur, serta perannya dalam SMT dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja organisasi mengenai kualitas dan keamanan informasi (Tertuang di Pedoman SMT)
7.4	Komunikasi	5.7	Komunikasi	Penyatuan proses dan dituangkan di Pedoman SMT
7.5	Infodok	7.5	Infodok	Pengaturan pengendalian informasi terdokumentasi dalam Pedoman SMT dan Prosedur Kerja Pengendalian Infodok
	7.5.1 Umum	7.5.1	Umum	
	7.5.2 Kreasi & Pemutakhiran	7.5.2	Kreasi & Pemutakhiran	
	7.5.3 Pengendalian Infodok	7.5.3	Pengendalian Infodok	
8.0	<b>OPERASIONAL</b>	8.0		<b>Pedoman SMT</b>
8.1	Perencanaan & pengendalian Operasional	8.1	Perencanaan & pengendalian control keamanan informasi	Memastikan SMT mengatur pendefinisian dan pengendalian proses & pada penetapan kontrol keamanan informasi (Pengaturan proses dan dituangkan di Pedoman SMT)
8.2	Penetapan persyaratan untuk produk & Jasa	-	-	(Tertuang di Pedoman SMT)
8.3	Rancangan & pengembangan	A.6.1.5	Keamanan informasi dalam manajemen proyek	Pengendalian/control ditetapkan sebagai bagian K-8.3 (Tertuang di Pedoman SMT)
8.4	Pengandaian produk & jasa yang disediakan pihak eksternal	A. 15	Hubungan dengan pemasok	Pengaturan kontrak dengan pemasok harus mencakup keamanan informasi klausul, dan keamanan informasi dapat menjadi salah satu kriteria untuk evaluasi pemasok (Tertuang di Pedoman SMT)
8.5	Penyediaan produk dan jasa	A. 12	Keamanan operasional	Pengaturan selama penyediaan produk & Jasa keamanan informasi terjamin (Tertuang di Pedoman SMT)
8.6	Pelepasan produk dan jasa	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
8.7	Pengendalian ketidaksesuaian hasil-hasil	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
9.0	<b>EVALUASI KINERJA</b>	9.0	<b>EVALUASI KINERJA</b>	
9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis & Evaluasi	9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis & Evaluasi	Pengaturan di Pedoman SMT
	9.1.1 Umum	9.1.1	Umum	Pengaturan di Pedoman SMT
	9.1.2 Kepuasan pelanggan	9.1.2	Kepuasan pelanggan	Pengaturan di Pedoman SMT dan diatur dalam Prosedur Kerja Persepsi Pelanggan & Penanganan Komplain
	9.1.3 Analisis & Evaluasi	9.1.3	Analisis & Evaluasi	Pengaturan di Pedoman SMT
9.2	Audit Internal	9.2	Audit Internal	Pengaturan di Pedoman SMT dan diatur dalam Prosedur Kerja Audit SMT

9.3	Tinjauan Manajemen	9.3	Tinjauan Manajemen	Pengaturan di Pedoman SMT dan diatur dalam Prosedur Kerja Tinjauan SMT
10.0	IMPROVEMENT/ PENINGKATAN	10.0	IMPROVEMENT/ PENINGKATAN	
10.1	Umum	-	-	Pengaturan di Pedoman SMT
10.2	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	10.1	Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	Pengaturan di Pedoman SMT dan diatur dalam Prosedur Kerja Ketidaksesuaian & Tindakan Koreksi
10.3	Peningkatan Berkelanjutan proses, produk & jasa	10.2	Peningkatan Berkelanjutan Proses keamanan Informasi	Pengaturan di Pedoman SMT dan diatur dalam Prosedur Kerja Improvement

Catatan: Infodok (Informasi Terdokumentasi); Tinjauan SMT (Tinjauan Sistem Manajemen Terintegrasi); Audit SMT (Audit Sistem Manajemen Terintegrasi)